

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL DALAM TRANSPORTASI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam rangka penyelesaian
studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**MAKMURI
NIM. 5116500118**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI
2020**

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM TRANSPORTASI

Disusun Oleh :

**MAKMURI
NIM. 5116500118**

**Telah diuji dan dipertahankan dihadapan Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :**

**Hari : Jum'at
Tanggal : 10 Januari 2020**


Penguji I


**DR. H. NURIDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0610116002**

Penguji II


**TONLHARYADI, SH, MH.
NIDN. 0020045801**

Pembimbing I


**DR. H. SANUSI, S.H., M.H
NIDN. 0609086202**

Pembimbing II


**GUFRON IRAWAN, S.H., M.HUM
NIDN. 0609086202**

**Mengetahui
Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal**


**Dr. H. Achmad Iwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
FAK. NIDN. 0615067604**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL DALAM TRANSPORTASI**

Disusun Oleh :

**MAKMURI
NIM. 5116500118**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :**

Pembimbing I



**DR. H. SANUSI, S.H., M.H
NIDN. 0609086202**

Pembimbing II



**GUFRON IRAWAN, S.H., M.HUM
NIDN. 0609086202**

**PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Makmuri
NPM : 5116500118

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Saya menyerahkan skripsi dan hasil penelitian didalamnya menjadi milik fakultas hukum Universitas Pancasakti Tegal serta memberikan izin untuk merecovery dan mempublikasikan dalam bentuk jurnal baik atas nama saya ataupun tidak melibatkan saya.

Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya ini.

Tegal, 10 Januari 2020

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text "METERAI TEMPEL" at the top, a small Indonesian national emblem on the right, the number "200584HF070381868" in the middle, and "6000 ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. There is also a small red floral emblem on the bottom right of the stamp.

Makmuri

MOTTO

Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu.

[Marcus Aurelius]

Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas kepala kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain.

[Thomas Hardy]

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
- ❖ Kedua Orang Tuaku, yang telah mendoakan dalam setiap sujud, dan setiap saat yang tak pernah bosan memberikan cinta kasihnya, dorongan, semangat.
- ❖ Isteri dan Anak-anakku yang selalu mensupport.
- ❖ Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal terutama sahabatku yang telah selalu memberikan motivasi
- ❖ Almamaterku Universitas Pancasakti Tegal

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum, Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya. Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Penulis meyakini dengan sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pancasakti beserta Para Wakil Rektor.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.

4. Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
5. Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
6. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
7. Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) dalam skripsi ini yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Gufron Irawan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Dr. H. Nuridin, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I Ujian Skripsi yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini.
10. H. Toni Haryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II Ujian Skripsi yang memberikan masukan terarah terhadap skripsi ini.
11. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, atas bantuan dan ilmu yang sangat berguna selama mengikuti proses belajar. Khususnya Rumpun Hukum Pidana, atas bimbingan, kritik dan saran, serta ilmu yang sangat berharga.
12. Kedua Orang Tuaku, Keluarga Besarku tercinta, terimakasih atass supportnya sehingga selesainya skripsi ini.

13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.

Dengan penuh harap dan iringan do'a, semoga jasa kebaikan beliau sekalian diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhir kata, karya ilmiah ini penulis haturkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi sempurnanya karya ilmiah ini. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Swt. Amin.

Wassallamu alaikum,Wr.Wb

Tegal, 11 Januari 2020

Penulis

Makmuri

ABSTRAK

Makmuri, 5116500118, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi.

Perlindungan hukum digunakan untuk melindungi korban, dan menjamin hak serta kewajibannya pada sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada pada saat ini. Khususnya bagi yang mencari kebenaran yang telah mengalami pelecehan seksual. Penulis menemukan beberapa bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada transportasi online sejak tahun 2015 hingga pada saat ini. Dalam hal ini, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online, serta mengetahui bagaimana perlindungan hukumnya.

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Dimana penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait untuk mendapatkan sumber bahan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online dan perlindungan hukum menurut perundang-undangnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terdapat 7 kasus tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada transportasi online. Untuk menghindari hal tersebut terus berulang maka pemerintah serta perusahaan yang menaungi transportasi online tersebut harus bekerjasama untuk melindungi konsumen maupun driver itu sendiri dengan cara mengesahkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 serta menambahkan tombol SOS atau tombol panik yang tertera pada aplikasi.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai tindak pidana transportasi online telah dilakukan sebagaimana mestinya seiring dengan berkembangnya jaman.

Kata kunci: perlindungan hukum, pelecehan seksual, transportasi online

ABSTRACT

Makmuri, 5116500118, *Implementation Legal Protection Against Women As Victims of Criminal Acts of Sexual Harassment in Transportation.*

Legal protection is used to protect victims, and guarantee their rights and obligations in the current criminal justice system and criminal system. Especially for those who seek the truth who have been sexually abused. The author found several forms of sexual harassment that occurred in online transportation from 2015 to the present. In this case, the problem raised by the author regarding the forms of criminal acts of sexual harassment on online transportation, as well as knowing how to legal protection.

The method used by the authors in this study is to use normative research methods. Where the authors use the source of primary legal materials, secondary legal materials and related tertiary legal materials to obtain sources of material regarding the forms of criminal acts of sexual harassment in online transportation and legal protection according to the law.

Based on the results of this study, from 2016 to 2018 there were 7 cases of sexual harassment that occurred in online transportation. To avoid this repetition, the government and companies that overshadow online transportation must work together to protect consumers and drivers themselves by ratifying the Minister of Transportation Regulation No. 108 of 2017 and adding the SOS button or panic button listed on the application.

The conclusion of this research is that legal protection against women as a criminal act of online transportation has been carried out accordingly along with the development of the era.

Keywords: legal protection, sexual harassment, online transportation

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
Abstract	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II KAJIAN TEORI.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Cyber Crime	21
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual atau Kesusilaan	27

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban Dalam Era Digital dalam Undang-Undang Indonesia	37
D. Tinjauan Umum Tentang Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pengguna Jasa Transportasi Online	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Transportasi Online	51
B. Implementasi Perlindungan Hukum dalam Perundang-undangan Terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Transportasi Online	58
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	81
Daftar Pustaka	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi. Teknologi informasi sudah dipandang sebagai salah satu senjata untuk bersaing di kompetisi global, kecenderungan ini terlihat dari tidak digunakannya lagi teknologi informasi sebagai pelengkap dari proses bisnis perusahaan transportasi umum online, namun teknologi informasi dijadikan sebagai bagian dari proses bisnisnya¹. Keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi merupakan terobosan akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan moda transportasi berbiaya murah, cepat dan nyaman².

Pada saat ini, masyarakat Indonesia sangatlah kecewa pada masalah transportasi yang sangat padat dan tidak karuan. Tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara menjadi alasan utama masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. Padahal di sisi lain, mereka harus gesit untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk makan, mengirim barang, atau membeli barang tertentu. Akibatnya, mereka mencari cara praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah atau kantor, salah satunya dengan menggunakan jasa transportasi online.

¹ Asril Sitompul, 2001, *Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.15.

² Perlu Payung Hukum Bagi Transportasi Berbasis Aplikasi - hukumonline.com (diakses pada tanggal 16 Desember 2019)

Disisi lain transportasi online masih menjadi pusat perhatian belakangan ini dikarenakan dalam menjalankan kegiatan usahanya dinilai masih belum memiliki payung hukum yang jelas dan dianggap ilegal. Pada suatu kasus transportasi online banyak ditemui adanya tindak kejahatan yang dialami oleh para pengguna transportasi online, hal tersebut menjadi penting manakala keberadaan transportasi online bersifat semipermanen atau jangka panjang. Jika keberadaan transportasi online bersifat jangka panjang, maka peraturan transportasi online sangat perlu untuk ditingkatkan dan dikaji menjadi lebih andal dan terjamin keamanan dan perlindungan hukumnya, hal ini penting untuk melindungi pengguna transportasi online tersebut. Hal tersebut bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda transportasi lain.

Pada beberapa kasus ditemukan adanya permasalahan mengenai seorang driver yang mencabuli atau melakukan pelecehan dan kekerasan seksual kepada konsumennya sendiri, hal tersebut tentu menimbulkan keresahan bagi para konsumen untuk dapat menikmati jasa transportasi online secara aman. Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam waktu ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi terjadi dimana-mana, demikian juga dengan kekerasan/ pelecehan seksual terlebih perkosaan.Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah

hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global³. Diantara manusia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan karena perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan dalam bidang kesusilaan.

Perkosaaan telah menjadi salah satu jenis kejahatan dibidang seksual yang membutuhkan perhatian yang serius, mengingat kasus ini dapat mengakibatkan persoalan komplikatif (serius dan beragam) dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, terutama kehidupan kaum perempuan, anak-anak dan masa depan suatu keluarga. Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki, perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. Kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki

³ Romli Atmasasmita. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 103.

rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Pelecehan seksual karena rentangnya yang demikian luas, dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun di komunitas yang *homogeny*. Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, Pelecehan seksual juga banyak terjadi di ditempat-tempat umum, di lingkungan keluarga termasuk di dalam transportasi online dan bahkan sangat umum ditemukan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak dikenal oleh korban, seperti misalnya pelecehan seksual dialam bis, umum, dijalanan, di pasar dan sebagainya.

Banyaknya oknum yang memiliki tingkat kemungkinan melakukan kejahatan lolos mendaftar menjadi seorang *driver* patut dipertanyakan, hal tersebut seharusnya dapat dicegah dan dapat dihindari untuk menjaga keamanan seorang konsumen dalam melakukan perjalanan. Sangat disayangkan apabila dalam terobosan transportasi berbasis online ini masih sangat rentan sebagai tindak kejahatan, terobosan transportasi online ini seharusnya menjadi jawaban dari segala keresahan masyarakat yang mereka

rasakan dalam transportasi umum termasuk dalam bidang konsumen merasa aman bukan hanya tentang efisiensi waktu saja.

Di Jakarta seorang driver online bernama Chairulloh tega mencabuli penumpangnya yang minta diantar berangkat ke tempat praktik kerja lapangan (PKL). Kasus bermula saat korban hendak berangkat dari rumahnya di Manggarai, Jakarta Selatan menuju ke tempat PKL pada hari Rabu, 6 September 2017 sekitar pukul 07.30 WIB. Korban memesan order ojek online yang dikemudikan pelaku. Bukannya diantar ke lokasi PKL, korban justru dibawa pelaku ke rumah temannya di Jalan Slamet Riyadi, Mataram, Jakarta Timur. Pelaku memaksa korban masuk ke dalam rumah yang saat itu dalam keadaan kosong. Korban dipaksa menuruti nafsu pelaku, kira-kira sampai 10 menit di rumah itu. Setelah itu pelaku baru mengantarkan korban ke tempat PKL⁴.

Pada kasus lain, ada seorang driver online yang melakukan pelecehan seksual melalui pesan singkat. Seorang konsumen yang memesan sebuah jasa ojek online dari Stasiun Citayam, Jakarta bukannya diantar selamat sampai tujuan malah mendapatkan sebuah kiriman pesan yang berisikan pelecehan seksual yang dikirimkan oleh driver online tersebut. Pelaku meminta korban untuk mampir ke kontrakan pelaku terlebih dahulu agar korban mau melayani pelaku sesuai dengan permintaanya, bahkan pelaku mengatakan akan membayar korban sebesar Rp 500.000,00 agar dapat menemani dan melayani pelaku sampai pukul 02.00 WIB. Korban yang

⁴ <https://news.detik.com/berita/3632420/order-diantar-ke-tempat-magang-siswi-dicabuli-driver-ojek-online> diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pada pukul 13.31 WIB.

menerima pesan singkat tersebut merasa kaget dan memilih tidak membalas dan mengabaikan pesan singkat pelaku serta membatalkan pesanan jasa ojek online tersebut. Pelaku yang tidak mendapat tanggapan dari korban malah semakin tidak tau diri dan terus mengirim pesan singkat kepada korban⁵.

Banyaknya terjadi kekerasan seksual yang diberitakan media masa merupakan indikasi daripada terus terjadinya berbagai pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Faktor-faktor penyebab dari semua hal tersebut karena pengaruh teknologi serta adanya peluang serta tidak dihukum secara seberat-beratnya para pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Dari indikasi tersebut terlihat bahwa sistem penegakan hukum pidana terutama untuk mencegah berbagai praktek kejahatan di bidang seksual masih lemah. Umumnya kejahatan seksual nanti terungkap ketika korban mengadu atau keluarga korban melaporkan telah terjadi pelecehan seksual. Tidak adanya upaya pencegahan dan tidak adanya hukum yang berat bagi pelaku pelecehan seksual menyebabkan perbuatan tersebut terus berulang.

Berdasarkan persoalan-persoalan diatas ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih rinci mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di transportasi online dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual di transportasi online serta bagaimana cara pencegahannya agar tidak terjadi tindak pidana pelecehan

⁵ <https://kumparan.com/@millennial/cerita-penumpang-dapat-chat-mesum-dari-driver-grabbike> diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pada pukul 13.41 WIB.

seksual yang dilakukan seorang driver transportasi online kepada konsumennya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti oleh Penulis. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum dalam perundang-undangan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana pelecehan seksual di transportasi online yang dilakukan oleh driver online kepada konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis simpulkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis untuk menambah dan mengembangkan kemampuan dalam berkarya ilmiah guna mengungkap secara objektif melalui pengkajian lebih dalam terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial saat ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya kepolisian sebagai bahan informasi baru dan pengetahuan mengenai upaya penanggungan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media sosial yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Johan Runtu, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”*. **Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado dalam Lex Crime Vol. 1/No.2/April-Jun/2020**, membahas membahas tentang apa ide dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap

korban tindak pidana perkosaan. Dengan menggunakan menggunakan metode penelitian hukum disimpulkan bahwa: 1. Ide dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana perkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dapat mencakup: a. Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri. b. Upaya pendampingan sangat dibutuhkan selama proses persidangan mengingat korban dapat/harus dipertemukan dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan. c. Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain: mendapatkan nasihat

hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir⁶.

2. Akbar Sayudi, Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. **Fiat Justisia, Faculty of Law, Lampung University, Bandarlampung**, Vol 10 Issue 2, January-March 2016: pp.1-220, membahas tentang Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undangan, LPSK, penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Fungsi pengadilan selain sebagai pemutus perkara, juga menerima laporan pelaksanaan kompensasi, atau restitusi, mengumumkannya serta memerintahkan instansi atau pihak-pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagainya. Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga

⁶ Johan Runtu, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*". Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado dalam Lex Crime Vol. 1/No.2/April-Jun/2020

kepada akibat-akibat yang menyimpannya, seperti kehamilan akibat perkosaan⁷.

3. Muhammad Hanafi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. 2019. **Skripsi**. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, membahas tentang pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan seseorang ini tentu saja menarik untuk diangkat saat ini. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui latarbelakang penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia, perspektif perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara

⁷ Akbar Sayudi, Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Fiat Justisia*, Faculty of Law, Lampung University, Bandarlampung, Vol 10 Issue 2, January-March 2016: pp.1-220

studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fakta kasus terjadinya kejahatan pelecehan seksual di Indonesia beraneka ragam, sebagaimana pelecehan seksual tersebut sering terjadi kepada perempuan yang menjadi korbannya. Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia yaitu dengan memberikan porsi penegakan hukum yang membedakan antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pelecehan seksual. Perspektif perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia yaitu korban berhak dilindungi baik sebelum persidangan dilakukan, sedang dilakukan berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, serta juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi⁸.

4. Ninda Khoirunnisa. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*. **Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**. 2017. Penelitian ini membahas tentang kebijakan penerapan hukum oleh hakim dalam

⁸ Muhammad Hanafi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. 2019. **Skripsi**. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,

menjatuhkan putusan perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas, untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta untuk mengetahui hambatan dalam menetapkan keadilan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan solusi untuk menanggulangnya. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah dengan memberikan diskresi atau kebijakan dalam pemenuhan hak-haknya, dimulai semenjak korban mengalami tindak kekerasan dan juga selama korban menjalani proses hukum⁹.

5. Iqbal Ramdhani, 2017. *Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*), Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

⁹ Ninda Khoirunnisa. **Skripsi**. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017

SALAM, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 4 No.1, pp. 95-120, membahas tentang Tindakan pelecehan seksual sudah tidak aneh lagi dan sudah banyak terjadi dimana-mana, di kantor, supermarket, tempat wisata, mall, dan angkutan umum. Ironisnya korban pelecehan seksual itu tidak hanya perempuan normal, akan tetapi juga perempuan penyandang cacat. Kasus pelecehan seksual dalam hal ini sudah pernah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST. Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 290 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan¹⁰.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika

¹⁰ Iqbal Ramdhani, 2017. *Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, **SALAM, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta** Vol. 4 No.1, pp. 95-120

keilmuan hukum dari sisi normatifnya¹¹. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri¹². Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian¹³.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

¹¹ Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press, hlm. 57.

¹² Johnny Ibrahim, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Jakarta: Banyumedia, hlm 310.

¹³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1996., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 43.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki adalah sebagai berikut¹⁵:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap¹⁶.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 93

¹⁶ *Ibid*, hlm 24

hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas¹⁷. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁸.

Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan bahan penelitian hukum yang dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Bahan hukum diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu¹⁹:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 47.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141

¹⁹ *Ibid*. hlm. 182

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas-asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.
- c. Bahan nonhukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti data driver, laporan pengaduan konsumen, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta penelitian dengan studi kasus atau dokumen. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis

bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan guna dapat memecahkan dan menjawab permasalahan pada penelitian yang dilaksanakan²⁰.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder dan tersier. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian²¹.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan uraian latar belakang penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika dari setiap bagian skripsi ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Bab ini membahas mengenai Teknologi, Kejahatan Cyber Crime, Kejahatan Seksual atau Kesusilaan, Perlindungan Korban Dalam Era Digital dalam Undang-Undang

²⁰ Tampil Anshari, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 21.

²¹ Zainuddin Ali, *Op.cit.* hlm. 107

Indonesia, Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pengguna Jasa Transportasi Online

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini menguraikan tentang Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Transportasi Online dan Perlindungan Hukum dalam Perundang-undangan Terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Transportasi Online

BAB IV PENUTUP. Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan maka akan diperoleh kesimpulan serta tidak lupa akan diuraikan saran-saran berdasarkan hasil tinjauan yuridis yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Cyber Crime

Fenomena *cyber crime* di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat umum. Kata teknologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *technikos* yang berarti kesenian atau keterampilan dan Logos yaitu ilmu atau asas-asas utama. Kata teknologi mengandung arti bahwa ilmu dibelakang keterampilan atau asas-asas utama daripada suatu keterampilan²².

Di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengakibatkan semakin derasnya lalu lintas informasi. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi semakin mudah didapatkan oleh setiap orang tanpa adanya hambatan ruang dan waktu. Globalisasi dalam dunia ekonomu khususnya dalam dunia perdagangan adalah satu aspek kehidupan yang mendapatkan imbas dari kehadiran media komunikasi yang cepat dan handal sehingga aktifitas bisnis di berbagai negara cenderung meningkat²³.

Ruang siber (*cyberspace*) adalah ruang dimana komunitas saling terhubung menggunakan jaringan (misalnya internet) untuk melakukan

²² Abdul Wahid dan M. Labib. 2015, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*. Bandung: Refika Aditama. 2005. hlm.15

²³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2010. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama. hlm.123

kegiatan sehari-hari²⁴. *Cyber* diartikan sebagai istilah lain, yaitu cyberspace yang diambil dari data *cybernetics*. John Perry Barlow pada tahun 1990 mengaplikasikan istilah *cyber* untuk istilah yang dihubungkan pada jaringan internet. Dalam perkembangannya, *cyber* membawa pengaruh positif dan negatif yang dapat menimbulkan suatu kejahatan dalam dunia *cyber*. Kejahatan yang lahir sebagai suatu dampak dan pengaruh negatif dari perkembangan teknologi pada internet ini disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*) yang mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet.

Teknologi, hukum dan masyarakat saat ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seiring dengan kemajuan teknologi, masyarakat dituntut untuk terus berkembang dan tidak sedikit mengakibatkan munculnya kejahatan-kejahatan baru dalam teknologi. Oleh karena itu, hukum menjadi bagian terpenting untuk mengatasi kriminalitas yang dapat merusak pertahanan negara.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa jenis-jenis kejahatan *cyber crime*²⁵

- a. *Unauthorized Acces to Computer System and Service*, Kejahatan ini dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya.

²⁴ Kementrian Pertahanan Indonesia, 2014, *Pedoman Pertahanan Siber*, Jakarta: Kemhan RI, hlm.5.

²⁵ Pristika Handayani. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. UNRIKA. hlm.4

Motifnya adalah bermacam-macam antara lain adalah sabotase, pencurian data dan sebagainya.

- b. *Illegal Contens*, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh yang termasuk kejahatan jenis ini adalah pornografi, pemuatan berita bohong, termasuk juga delik-delik politik dapat dimasukkan kedalam kategori ini bila menggunakan ruang *cyber*.
- c. *Data Forgery*, merupakan kejahatan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai dokumen melalui internet.
- d. *Cyber Espionage*, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan cara memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau datanya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized.
- e. *Cyber Sabotage and Extortion*, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus komputer atau program tertentu sehingga

data program komputer atau sistem jaringan tidak dapat digunakan lagi, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini juga sering disebut dengan kejahatan *cyber terrorism*.

- f. *Offence Against Intellectual Property*, merupakan kejahatan ditunjukan terhadap HKI atau Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Misalnya, meniru tampilan web suatu situs tertentu, penyiaran rahasia dagang yang merupakan rahasia dagang orang lain.
- g. *Infringements of Privacy*, merupakan kejahatan ditunjukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan simpan secara computerized. Yang apabila diketahui orang lain maka dapat menimbulkan kerugian terhadap korban secara materiil atau immateriil, misalnya nomor PIN ATM, nomot kartu kredit dan sebagainya.

Selain kejahatan yang dipaparkan diatas, terdapat juga jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *cyber crime* yaitu:

- a. *Cyber Terrorism*.
- b. *Cyber Pornography*.
- c. *Cyber Harrassment*.
- d. *Cyber Stalking*.
- e. *Hacking*
- f. *Carding (credit card fraud)*

Menurut pendapat McDonnell dan Sayers, ancaman siber terdiri atas tiga jenis, yaitu²⁶:

- a. Ancaman perangkat keras (*hardware threat*). Ancaman ini merupakan ancaman yang disebabkan oleh pemasangan perangkat tertentu yang berfungsi untuk melakukan kegiatan tertentu didalam suatu sistem, sehingga peralatan tersebut merupakan gangguan terhadap sistem jaringan dan perangkat keras lainnya.
- b. Ancaman perangkat lunak (*software threat*). Ancaman ini merupakan ancaman yang disebabkan masuknya perangkat lunak tertentu yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pencurian, perusakan, dan manipulasi informasi.
- c. Ancaman data/informasi (*data/information threat*). Ancaman ini merupakan ancaman yang diakibatkan oleh penyebaran data/informasi tertentu yang bertujuan untuk kepentingan tertentu.

Dalam kajian Strategis Keamanan Siber Nasional, ancaman kejahatan siber (*cyber crime*) didefinisikan sebagai setiap kondisi dan situasi serta kemampuan yang dinilai dapat melakukan tindakan atau gangguan atau serangan yang mampu merusak atau segala sesuatu yang merugikan sehingga mengancam kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) sistem dan informasi²⁷. Ancaman siber dapat terjadi karena adanya kepentingan dari berbagai individu maupun suatu

²⁶ *Ibid*

²⁷ Iwan, dkk. Kajian Strategi Keamanan Cyber Nasional: Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional di Bidang Keamanan Cyber. Jakarta: **Tesis Universitas Pertahanan Indonesia**. 2012.

kelompok atau komunitas tertentu dalam aspek kehidupan masyarakat dapat menimbulkan berbagai ancaman fisik, baik nyata ataupun yang tidak nyata dengan menggunakan kode-kode komputer (*software*) untuk melakukan pencurian informasi (*information theft*), kerusakan sistem (*system cestruction*), manipulasi informasi (*information corruption*) atau perangkat keras (*hardware*) untuk melakukan gangguan terhadap sistem (*network instruction*) ataupun penyebaran data dan informasi tertentu untuk melakukan kegiatan propaganda²⁸. Kejahatan siber (*cyber crime*) di Indonesia marak sekali terjadi.

Semua tindak kriminal yang berhubungan dengan siber sangat beragam jenisnya, mulai dari hak cipta, pembajakan penyalahgunaan akses bahkan hingga pencemaran nama baik perseorangan maupun institusi serta pelecehan seksual. Namun hal ini sangat berbanding terbalik dengan hukum yang mengatur tentang kejahatan siber yang masih sangat minim batasan yang bisa dijadikan acuan untuk menherat pelaku dalam melakukan tindak kriminal. Dalam pembahasan ini Penulis hanya akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dan menyangkut tentang pelecehan dan/atau kekerasan seksual saja.

²⁸ *Ibid.*

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual atau Kesusilaan

1. Pengertian Kejahatan Seksual atau Kesusilaan

Kejahatan adalah suatu nama yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai bentuk dari perbuatan jahat. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria berlangsung pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut umur²⁹.

Masalah kejahatan adalah masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan jaman dan teknologi. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar karena memang sudah memiliki niat untuk melakukan sebuah kejahatan. Namun kejahatan bisa juga dilakukan setengah sadar, misalnya kejahatan yang dilakukan karena adanya dorongan, paksaan yang sangat kuat, dan oleh obsesi-obsesi.

Ada pula kejahatan yang dilakukan secara tidak sadar sama sekali, misalnya karena terpaksa harus melakukan kejahatan untuk mempertahankan hidupnya yang terancam maka seseorang harus melakukan perlawanan yang berakhir dengan tindakan kejahatan. Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan seksual itu merupakan

²⁹ Arief Gosita. Masalah Korban Kejahatan. **Skripsi Universitas Trisakti. Jakarta**. Hlm.15

istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, yang merugikan perilaku korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.

Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Mayer dkk. (1987) menyatakan secara umum bahwa ada 3 (tiga) aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual, yaitu perilaku (apakah hal itu merupakan proposisi seksual), aspek situasional (apakah ada perbedaan dimana atau kapan perilaku tersebut muncul) dan aspek legalitas (dalam keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan ilegal).

Berdasarkan aspek perilaku, Farley (1978) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik (Zastrow dan Ashman, 1989; Kremer dan Marks,

1992), dimana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada pelecehan secara fisik. Para peneliti tersebut menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

Pelecehan seksual dalam bentuk godaan fisik diantaranya adalah tatapan yang sugestif terhadap bagian-bagian tubuh (menatap payudara, pinggul atau bagian tubuh yang lain, lirikan yang menggoda dan mengejap-gejapkan mata, rabaan; mencakup cubitan, remasan, menggelitik, mendekap, dan mencium, gangguan seksual seperti rabaan atau ciuman yang terjadi karena situasi yang sangat mendukung misalnya di lift, koridor dan ruangan lain yang sepi, memojokkan perempuan untuk dicium, proposisi seksual, tekanan yang halus untuk aktivitas seksual, usaha perkosaan dan perkosaan itu sendiri.

Dipandang dari aspek situasional, pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik,

status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan (Hadjifotiou, 1983; Higgins dan Hawkins, 1986).

2. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Menurut Fitzgerald dan Schullman ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan antara lain:

- a. *Tingkatan Pertama Gender Harassment* merupakan Pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuknya antara lain, yaitu: cerita porno atau gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditunjukan kepada seseorang; kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang tak pantas; memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan gender; serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.
- b. *Tingkatan Kedua Seduction Behavior* merupakan rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanoa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya

antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang; perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang; ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila; mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang.

- c. *Tingkatan Ketiga Sexual Bribery* merupakan ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya: hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain; secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.
- d. *Tingkatan Keempat sexual Coercion atau Threat*, merupakan adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-

bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang. Ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.

- e. *Tingkatan Kelima Sexual Imposition*, merupakan serangan atau paksaan yang bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatannya antara lain:

- a. *Serious Forms of Harassment* : Pelecehan seksual yang bersifat serius seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan seksual.

- b. *Less Serious Forms of Harassment* : Pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja³⁰.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual itu, dapat dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu:

- a. Bentuk kekerasan seksual yang tergolong ringan, yang bagi pelaku tidak dikenai sanksi (*seductive behavior*) ataupun perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Perbuatan - perbuatan tersebut dapat berupa:
- (1) Tingkah laku dan komentar yang berkenaan dengan peran jenis kelamin.
 - (2) Tekanan langsung atau halus untuk tindakan seksual seperti: berciuman, berpegangan tangan, menepuk bagian tertentu.
 - (3) Sentuhan atau kedekatan fisik yang tidak diundang seperti: mendorong alat kelamin (penis atau dada) pada korbannya.
 - (4) Perhatian seksual yang tidak diundang dan tidak disukai serta tidak pada tempatnya.
- b. Bentuk pelecehan seksual yang tergolong berat dan bagi si pelaku dikenakan sanksi atau ancaman hukuman (*sexual*

³⁰ Sandra S.Tangri, Martha R. Burt dan Leanor B. Johnson. Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models.hlm 89-11

coercion). Perbuatan itu berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dan kejahatan seksual atau pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan (*sexual assault*).

Saat ini perkosaan cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia. Perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

3. Macam-macam Perkosaan

Macam-macam perkosaan menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma adalah sebagai berikut ³¹:

- a. *Sadistic Rape*; yakni perkosaan sadistis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Angea Rape*; yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan

³¹ Abdul Wahiddan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Malang: Reflika Aditama, hlm. 46.

perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

- c. *Dononation Rape*; yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. *Seductive Rape*; yaitu suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim Precipitated Rape*; yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation Rape*; yakni perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya

secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasunya ini kepada pihak yang berwajib.

4. Karakteristik umum tindak pidana perkosaan:³²
 - a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak perkosaan;
 - b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
 - c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu;
 - d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu; *anger rape*, *power rape* dan *sadistic rape*. Dan ini direduksi dari *anger and violation*, *control and domination*, *erotis*;
 - e. Ciri pelaku perkosaan; mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.

³² *Ibid.* hlm. 48

- f. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe, 4-19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban;
- g. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibukti

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban Dalam Era Digital dalam Undang-Undang Indonesia

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlidungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demiiian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku³³.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh

³³ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, Republika, 24 Mei 2004

pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁴

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- (a) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut³⁵.
- (b) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵

³⁴ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm. 12

- (c) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia³⁶.
- (d) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum³⁷.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam

³⁶ Setiono. 2004. *Rule of Law*, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm.3

³⁷ Muchsin, 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum yang lainnya tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti yang dibahas pada bab selanjutnya karena menurut Penulis hubungan antara penumpang dengan driver adalah hubungan antara konsumen dengan penyedia layanan jasa. Hal ini karena menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁸ Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen³⁸.

Sedangkan Az. Nasution mendefinisikan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup³⁹.

Perlindungan konsumen merupakan akibat dari kemajuan teknologi dan peradaban manusia dimana terdapat perbedaan antara

³⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.1.

³⁹ Az. Nasution. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. 2011. hlm.22

masyarakat yang awalnya mendasarkan pada kepercayaan dalam menggunakan barang dan jasa serta melalui tahap yang sederhana, tatapmuka dalam melakukan, memanfaatkan barang dan jasa menjadi semakin rumit ketika teknologi semakin maju dimana konsumen bisa dikatakan tidak lagi tahu siapa yang menjual barang dan jasa. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang awal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai pada kepada akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ada kejadian yang tidak adil terhadap dirinya, maka ia akan secara spontan menyadari akan hal itu. Setelah itu konsumen dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4, hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sedangkan apabila konsumen berkedudukan sebagai penumpang maka ia tidak diatur secara pasti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, kewajiban penumpang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena kedudukan penumpang dalam proses pengangkutan bertindak juga sebagai konsumen.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha pengangkutan (*transport ondernemer*) atas keselamatan barang dan/orang, kelambatan datangnya barang dan/orang, baik kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut, dengan demikian posisi pelaku usaha pengangkutan sama dengan pengangkutan yang dimaksud dalam Pasal 91 KUHD. Kedudukan hukum pelaku usaha angkutan umum sama dengan pengangkut.

Mengenai luas tanggung jawab pengangkut tercantum dalam Pasal 1236 KUHPerdara yaitu pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya dan rugi bunga yang layak harus diterima, bila ia tidak menyerahkan atau tidak merawat sepantasnya untuk menyelamatkan barang-barang serta dalam Pasal 1246 KUHPerdara yaitu biaya kerugian bunga itu terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan laba yang sedianya akan diperoleh, kerugian harus diganti.

D. Tinjauan Umum Tentang Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pengguna Jasa Transportasi Online

1. Pertanggungjawaban Transportasi Online

Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, baik dalam investasi, produksi, distribusi dan segala kegiatan yang berkaitan dengan itu senantiasa akan terkait dengan pihak lain yang sering dikenal pihak pengguna atau konsumen. Yang menjadi masalah apabila kegiatan usaha yang dilakukan berakibat menimbulkan kerugian pada pihak konsumen yang dapat berakibat langsung atau tidak langsung. Kerugian yang timbul bisa terjadi melalui transaksi yang dilakukan, bisa berupa kerugian fisik atau ekonomis.

Munculnya gerakan perlindungan konsumen, dilatarbelakangi karena banyaknya permasalahan sebagai akibat dari posisi masyarakat (konsumen) dan agresivitas produsen (korporasi) dalam melakukan kegiatan dan menawarkan produk-produknya, tanpa memperhatikan mutu, etik, dan tanggung jawab korporasi yang sering kali hanya menguntungkan dirinya dan menimbulkan kerugian akibat dipihak konsumen, yang kadang kala bukan hanya kerugian materi, cacat fisik tetapi juga menyangkut jiwa manusia.

Pola hubungan antara perusahaan transportasi online dengan driver adalah hubungan kemitraan. Dalam bidang hukum hubungan kerja sama antar perusahaan melalui pola kemitraan tidak lepas dari hukum perjanjian antara para pihak, yang didasarkan pada asas

kebebasan berkontrak. Dengan melalui perjanjian akan diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk konsekuensinya apabila ada pihak yang melanggar perjanjian atau tidak memenuhi kewajibannya. Disini hukum berfungsi untuk memberi rambu-rambu atau aturan agar kerjasama yang sudah dijalin melalui akte kesepakatan bersama dapat berjalan dengan baik⁴⁰. Jadi, tanggung jawab yang diberikan perusahaan transportasi online kepada konsumen atas dasar hubungan kemanusiaan.

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan timbul karena adanya perbuatan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian pada pihak konsumen. Hal ini bisa dilihat dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan mewajibkan pihak perusahaan untuk membayar ganti rugi dan Pasal 1865 KUHPerdata dengan kewajiban pihak konsumen untuk membuktikannya.³² Kemudian bisa juga dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi dijelaskan melalui Pasal 19 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 yakni dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan

⁴⁰ Absori. 2014. *Hukum Ekonomi di Indonesia (Beberapa Aspek Pengembangan Pada Era Liberalisasi Perdagangan)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press. hlm.75

kesehatan dan/atau pemberian santunan. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana. Apabila pelaku usaha hendak melepaskan diri dari tanggung jawab maka pelaku usaha dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian.

2. Jaminan dan Tanggung Jawab Go-Jek⁴¹

Go-Jek tidak memberikan jaminan atau garansi untuk dapat diandalkan, ketepatan waktu, kualitas, kesesuaian, ketersediaan, akurasi atau kelengkapan layanan, situs web dan/atau perangkat lunak aplikasi, termasuk namun tidak terbatas pada layanan yang diperoleh atau berasal dari penyedia layanan melalui penggunaan aplikasi tersebut. semua kondisi, pernyataan dan jaminan, baik tersurat, tersirat, yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebaliknya, termasuk, namun tidak terbatas pada jaminan yang tersirat mengenai jual beli, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tidak adanya pelanggaran hak pihak ketiga, dengan ini dikecualikan dan dikesampingkan dengan batas tertinggi dan maksimum.

Go-Jek tidak bertanggung jawab atas setiap cedera, kematian, kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perilaku dari para penyedia layanan. Go-Jek juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan, termasuk pelanggaran lalu lintas, atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh penyedia layanan selama pelaksanaan layanan.

⁴¹ <https://www.go-jek.com/terms-and-condition/>

Penyedia layanan hanya merupakan mitra kerja Go-Jek, bukan pegawai, agen ataupun perwakilan dari Go-Jek itu sendiri. Namun Go-Jek tetap memperdulikan keselamatan pengguna aplikasi dan bersedia untuk memberikan bantuan keuangan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas pertimbangan pribadi dan mutlak untuk barang yang hilang atau rusak saat menggunakan layanan dari penyedia layanan sepanjang barang tersebut mematuhi ketentuan penggunaan.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa juga memberikan santunan musibah kecelakaan kepada seluruh pelanggan Go-Jek yang menggunakan layanan. Konsumen akan menerima penggantian sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk biaya rumah sakitnya sampai dengan Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah).

3. Jaminan dan Tanggung Jawab Grab⁴²

Grab tidak memberikan jaminan, garansi, atau pernyataan mengenai tindakan atau tindakan dari instansi penegak hukum manapun, dan tidak akan melakukan intervensi dalam perselisihan antara klien dan/atau karyawan klien dan/atau lembaga penegak hukum. Setiap klaim yang disampaikan oleh karyawan klien atas segala kehilangan atau kerusakan yang mungkin dialami akan terjadi

⁴² <https://www.grab.com/id/insurance>

antara karyawan klien dan layanan transportasi, dan grab tidak akan menilai keamanan, keandalan, kesesuaian, legalitas atau kemampuan baik karyawan klien atau pihak ketiga sehubungan dengan penggunaan Grab App.

Namun Grab telah bekerjasama dengan perusahaan asuransi global untuk berinovasi menemukan solusi baru yang sesuai dengan kebutuhan penumpang maupun driver. Pengemudi yang memenuhi syarat yang terdaftar di Grab dan penumpang yang memesan dan membayar yang telah terdaftar untuk berkendara dengan Grab yang terdaftar ditanggung oleh polis ini. Setiap kali penumpang berada di pemesanan Grab, maka asuransi kecelakaan pribadi mencakup perjalanan secara keseluruhan. Pihak asuransi memberikan tunjangan kematian hingga sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan memberikan jaminan kepada seseorang yang dipertanggungkan menderita cedera selama perjalanan yang menghasilkan cacat permanen dan serta memberikan jaminan kepada seseorang yang dipertanggungkan menderita cedera selama perjalanan yang menimbulkan biaya untuk perawatan medis, pihak asuransi memberikan tunjangan hingga sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Untuk melakukan klaim asuransi silahkan melaporkan kecelakaan ke layanan pelanggan Grab dan polis segera jika terlibat dalam kecelakaan selama perjalanan bersama Grab. Semua

kecelakaan harus dilaporkan kepada perusahaan asuransi dengan mengirimkan laporan klaim dalam jangka waktu perjanjian yang ditetapkan, selambat-lambatnya 30 hari dari kecelakaan terjadi. Semua bukti yang relevan dan dokumen yang diperlukan, seperti copy identitas diri, resume medis, kuitansi/bukti biaya rumah sakit asli, laporan kecelakaan dari kepolisian (jika ada), bukti pemesanan Grab dan bukti-bukti yang relevan lainnya harus diserahkan kepada perusahaan asuransi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Transportasi Online

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Kedua BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. KUHP tidak mengenal istilah perbuatan seksual, tetapi dikenal dengan perbuatan cabul yang diatur pada Pasal 289 sampai dengan 296 KUHP. Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Adanya transportasi online dimulai pada tahun 2015. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk dalam hal transportasi. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi yang mempermudah akses bagi masyarakat, tindak pidana masih kerap terjadi termasuk pada transportasi online yang salah satu kejahatannya adalah pelecehan seksual. Pada bab ini, penulis mengkaji bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada transportasi online. Terdapat 7

(tujuh) kasus mengenai pelecehan seksual yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan 2018 dengan berbagai bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Pelecehan dengan mengirim pesan yang tidak senonoh. Kejadian ini terjadi pada tanggal 18 Mei 2017 di Depok, Jawa Barat. Jessy, seorang anak berusia 12 (dua belas) tahun yang masih menempuh pendidikan tingkat SMP dilecehkan oleh seorang sopir taksi online melalui pesan singkat dan bahkan mengirim pesan WhatsApp tidak senonoh kepada anak tersebut. Hal ini berawal ketika Jessy pulang setelah belajar kelompok yang kemudian memesan taksi berbasis aplikasi atau taksi online. Sang sopir awalnya menanyakan sekolah dan dengan siapa tinggal di rumah. Namun, Jessy hanya menjawab seadanya. Jessy memang selamat sampai di rumah, namun menurutnya dia bisa saja menjadi korban perkosaan. Tidak berhenti sampai di situ saja, sopir tersebut justru menelpon dan mengirimkan pesan singkat yang tidak senonoh kepada Jessy⁴³. Dengan begitu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena melanggar Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁴³.
2. Pelecehan dengan percobaan perkosaan. Pelecehan ini terjadi di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada tanggal 14 Agustus 2017 saat sejumlah personel Patroli

⁴³ <http://www.gentanusa.com/2017/05/bocah-12-tahun-ketakutan-dilecehkan.html>

Motor Sabhara Polres Gowa menggelar patroli. Anggota yang sedang patroli rutin tersebut melihat ada sebuah mobil minibus terparkir di pinggir jalan ditempat yang sepi tapi ternyata pada saat diperiksa ada perempuan yang terlihat tengah meronta sambil memukul-mukul kaca jendela taksi online tersebut dari dalam mobil yang hendak diperkosa. Korban (S) adalah penumpang terakhir pada taksi online tersebut sehingga pada saat melewati jalan yang sepi, pelaku (IL) langsung melancarkan aksinya untuk mencoba memerkosa korban³⁶. Dengan begitu pelaku dapat diancam dengan pasal berlapis dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) karena telah melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 285 jo. Pasal 35 KUHP karena telah melakukan percobaan perkosaan⁴⁴.

3. Pelecehan seksual dengan melakukan tindakan dan perhatian seksual. Pelecehan ini terjadi pada saat korban (GS) memesan taksi berbasis online untuk melakukan perjalanan dari Jalan Diponegoro menuju Kelurahan Pulo Baryan pada tanggal 5 September 2017. Pada saat korban sampai ditempat tujuan pemesanan, pengemudi taksi online yang tak lain adalah dari pelecehan seksual ini langsung menarik dan mencium tangan korban. Tidak berhenti pada tindakan seksual yang dilakukan pada saat itu, pelaku (H) juga masih mengirimkan beberapa

⁴⁴ <https://regional.kompas.com/read/2017/07/15/08291521/sopir-taksi-online-tertangkap-basah-hendak-perkosa-penumpangnya>

pesan singkat yang berisi rayuan hingga pada tanggal 7 September 2017³⁷. Dengan begitu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun penjara karena telah melakukan perbuatan cabul dan melanggar Pasal 289 KUHP⁴⁵.

4. Pelecehan seksual dengan melakukan perbuatan tidak senonoh. Pelecehan seksual yang terjadi di Medan. Tindakan asusila itu bermula saat Korban (VS) memesan taksi online dari Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, menuju rumahnya di Jalan Indrapura, Medan. Awalnya komunikasi antara pengemudi dan penumpang berlangsung baik. Namun, belakangan pelaku (IZ) semakin berani bertanya hal pribadi, termasuk persoalan hubungan seks korban dengan suaminya. Perjalanan mobil itu pun agak melenceng dari yang seharusnya. Saat di Jalan MT Haryono, mobil yang seyogianya lurus, dibawa membelok ke Jalan Jawa dan mengarah ke Jalan HM Yamin Medan. Sepanjang perjalanan dari Jalan Imam Bonjol, pelaku terus berbicara soal seks. Dari Jalan HM Yamin, pelaku membelokkan mobilnya ke Jalan Madong Lubis. Dia kemudian menghentikan mobilnya di tempat sepi dan mengatakan bahwa dia telah terangsang. Dia menunjukkan kemaluannya kepada korban dan nekat melakukan onani di depan korban³⁸. Dengan begitu pelaku dapat diancam dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak

⁴⁵ <https://regional.kompas.com/read/2017/09/08/20313841/penumpang-perempuan-mengaku-dilecehkan-sopir-taksi-online-di-medan>

Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) karena telah melanggar Pasal 281 KUHP dengan melakukan pelanggaran kesusilaan⁴⁶.

5. Pelecehan seksual dengan perampasan. Di Jakarta Driver taksi online AN melakukan pelecehan seksual kepada penumpang perempuannya pada tanggal 12 Februari di sekitar kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku melakukan aksi bejat itu lantaran karena korban berparas cantik. Di tengah perjalanan, pelaku membelokkan mobilnya keluar dari tol. Korban, yang selama perjalanan tertidur, terbangun dan mengetahui mobil sudah keluar dari kawasan tol. Di tempat sepi, korban digerayangi oleh pelaku. Ketika hendak diperkosa, dalam kondisi ketakutan, korban akhirnya membuat strategi dengan menyampaikan kepada pelaku bahwa ia tengah hamil 2 bulan. Pelaku pun melepaskannya di tempat sepi. Tapi sebelum itu, tersangka membawa kabur ponsel korban untuk menghilangkan jejak³⁹. Dengan begitu pelaku dapat diancam penjara paling lama 9 (sembilan) tahun penjara karena telah melakukan perbuatan cabul serta membawa kabur ponsel korban yang melanggar Pasal 289 KUHP serta Pasal 368 KUHP⁴⁷.
6. Pelecehan seksual dengan ajakan serta imbalan. Pada kasus lain, ada seorang driver online yang melakukan pelecehan seksual melalui pesan singkat. Seorang konsumen yang memesan sebuah jasa ojek

⁴⁶ <https://www.merdeka.com/peristiwa/driver-taksi-online-dilaporkan-onani-di-depan-penumpang-wanita-hamil.html>

⁴⁷ <https://news.detik.com/berita/d-3866107/polisi-driver-taksi-online-lecehkan-penumpang-karena-cantik>

online dari Stasiun Citayam, Jakarta bukannya diantar selamat sampai tujuan malah mendapatkan sebuah kiriman pesan yang berisikan pelecehan seksual yang dikirimkan oleh driver online tersebut. Pelaku meminta korban untuk mampir ke kontrakan pelaku terlebih dahulu agar korban mau melayani pelaku sesuai dengan permintaanya, bahkan pelaku mengatakan akan membayar korban sebesar Rp 500.000,00 agar dapat menemani dan melayani pelaku sampai pukul 02.00 WIB. Korban yang menerima pesan singkat tersebut merasa kaget dan memilih tidak membalas dan mengabaikan pesan singkat pelaku serta membatalkan pesanan jasa ojek online tersebut. Pelaku yang tidak mendapat tanggapan dari korban malah semakin tidak tau diri dan terus mengirim pesan singkat kepada korban.⁴⁸ Dengan begitu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena melanggar Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁴⁸.

7. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan dan perampokan. Sedangkan dalam kasus lain, di Jakarta seorang driver taksi online gadungan juga melakukan percobaan pemerkosaan yang dialami wanita berinisial SS (35). Pelaku melakukan aksinya dengan meminjam akun driver taksi online milik ayah tirinya, kemudian

⁴⁸ <https://kumparan.com/@millennial/cerita-penumpang-dapat-chat-mesum-daridriver-grabbike>

dengan dua pelaku lainnya, pelaku mulai merencanakan aksi perampokan dan percobaan pemerkosaan setelah menerima pesanan korban. Ketiga pelaku tersebut mempunyai peran masing-masing. Seorang sebagai pengemudi dan dua pelaku lainnya bersembunyi di bagian belakang mobil. Kasus perampokan dan percobaan pemerkosaan ini terungkap setelah polisi mempelajari rekaman CCTV yang memperlihatkan dua pelaku tengah menguras ATM milik korban.⁴¹ Dengan begitu pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara karena telah melanggar Pasal 365 KUHP serta Pasal 285 jo. Pasal 53 KUHP karena telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta melakukan percobaan perkosaan⁴⁹.

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan di atas, terdapat 7 (tujuh) bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Tindak pidana pelecehan seksual yang menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu pada kasus sebagai berikut: a. Pelecehan seksual dengan mengirim pesan tidak senonoh; dan b. Pelecehan seksual dengan ajakan serta imbalan

⁴⁹ <https://m.liputan6.com/news/read/3491434/kronologis-sopir-taksi-online-coba-perkosa-penumpang-di-tambora>

2. Tindak pidana pelecehan seksual yang tidak menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu terjadi pada kasus sebagai berikut:
 - a. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan;
 - b. Pelecehan seksual dengan melakukan tindakan dan perhatian seksual;
 - c. Pelecehan seksual dengan melakukan perbuatan tidak senonoh;
 - d. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampasan; dan
 - e. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampokan.

B. Implementasi Perlindungan Hukum dalam Perundang-undangan Terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Transportasi Online

Perlindungan hukum pada korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang

perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafat hidup bangsa Indonesia, masalah prikemanusiaan dan prikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual tidak lepas dari akibat yang diderita korban setelah tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang dialaminya. Korban tidak saja menderita secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang di derita korban sebagai dampak dari tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak Secara Fisik, antara lain: infeksi pada alat kelamin, infeksi pada paggul, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, menderita migrant, sulit tidur, dan lain-lain.
2. Dampak Secara Mental, antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/ mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam Kehidupan Pribadi dan Sosial, antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain⁵⁰.

Tidak hanya penderitaan itu saja yang di derita oleh korban apabila korban memutuskan untuk melaporkan tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang dialaminya tersebut kepada aparat penegak hukum. Tidak menutup kemungkinan korban akan mengalami perlakuan tidak adil dalam proses peradilan. Pentahapan penderitaan korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut⁵¹:

1. Sebelum Sidang Pengadilan. Korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor kepada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dala, rangka mengumpulkan data untuk bukti adanya tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadapnya.

⁵⁰ Topo Santoso. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta. IND.HILL-CO. hlm. 40-42

⁵¹ Arif Gosita. 1987. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta. IND.HILL-CO. hlm. 13-14

2. Selama Sidang Pengadilan. Korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulangi cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual yang ia alami. Ia dihadapkan pada pelaku yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan/atau kekerasan seksual sekaligus orang yang paling dibencinya. Selain itu ia juga harus menghadapi pembelaan atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atau pembela untuk pihak korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual.
3. Setelah Sidang Pengadilan. Korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatan tetap menjadi tanggung jawabnya. Ia tetap dihantui rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena

ia telah cacar. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan. Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban yang di implementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban.

Dasar pertimbangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Pasal 2 yang menyatakan bahwa “ Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”
2. Pasal 3 menyatakan bahwa : (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan; (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil

serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum; (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

3. Pasal 5 menyatakan bahwa “ (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum; (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak; (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”
4. Pasal 7 menyatakan bahwa “(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia; (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.”
5. Pasal 8 menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”
6. Pasal 17 menyebutkan bahwa “Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,

pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental maupun penderitaan ekonomi saja, melainkan bisa juga kombinasi diantara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada

Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- . Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- o. Mendapat pendampingan.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Dalam kasus pelecehan seksual selain mendapatkan hak-hak diatas, korban mendapatkan hak menjadi saksi dalam memberikan kesaksian di muka persidangan. Hal tersebut memberikan kemudahan dalam hal pembuktian dimana keterangan seorang saksi korban saja sudah dapat dijadikan alat bukti yang sah disamping alat bukti lainnya, seperti alat bukti surat *visum et repertum* ataupun keterangan dari seorang ahli seperti dokter ataupun psikolog.

Dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain, tindak

pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/ atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga telah mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yaitu:

Pasal 98

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Mengacu pada uraian diatas, ada beberapa bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Restitusi

Restitusi menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik,

pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Korban pelecehan dan/atau kekerasan seksual berhak memperoleh restitusi karena pelecehan dan/atau kekerasan seksual merupakan tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan (court, rechtsspraak) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini restitusi dimaksudkan dan diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban⁵².

2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, korban tindak pelecehan dan/atau kekerasan seksual juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dapat diajukan oleh korban, keluarga

⁵² Lilik Mulyadi. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif, Teoritis, dan Praktik. Alumni. Bandung. hlm. 253-254

korban, dan kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diatas kertas bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Disamping itu perlu diperhatikan pula hak-hak korban yang terdapat dalam Pasal 5 yang terdapat pada undang-undang tersebut.

3. Perlindungan dari Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

4. Perlindungan dari Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, dan tidak

memberi penilaian buruk kepada korban. Pelecehan seksual sendiri sebenarnya termasuk kejahatan yang cukup berat karena dapat diancam mulai dari hukuman penjara dua tahun delapan bulan atau denda sesuai dengan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga hukuman yang sangat berat dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara apabila pelecehan menjadi pemerkosaan sesuai dengan yang tertera pada Pasal 285 KUHP.

Sehubungan dengan itu, hukum yang menyangkut pelecehan seksual dan bagaimana penegekan hukumnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan, pertama mereview dan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap wanita, yang mengurangi kebebasan wanita korban untuk melapor dan kedua yang menghambat eksekusi hukuman bagi pelaku kekerasan⁵³.

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pelecehan seksual dapat dilihat pada Pasal 285 sampai dengan Pasal 292 KUHP. Pasal 285KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dalam Pasal 285 tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah; **Pertama**, tentang unsur ‘barang siapa’ (subyek tindak

⁵³ Abdullah Cholili. *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita. Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*. PPK UGM-Ford Foundation. November. 1996. Hlm.6.

pidana) dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis*. Namun kalau kita simak makna Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau subjek tindak pidana adalah “orang” atau manusia”;

Kedua, tentang unsur “kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya;

Ketiga, ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Dalam hal perkosaan dilakukan dengan ancaman, hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya tersebut atau tidak. Wujud kekerasan ini bisa berupa diancam akan ditembak, diancam akan dibunuh, diancam akan dibacok, diancam akan ditenggelamkan, diancam akan dibakar dan lain sebagainya;

Keempat, unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin, pelaku ingin berbuat cabul sementara korban tidak mau/ingin;

Kelima, unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita diluar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dalam hal terjadi pemaksaan nafsu wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita terhadap wanita maka yang terjadi adalah tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP;

Keenam, untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan. Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam Pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak ada, putusan yang ditetapkan berdasarkan hakim yang menjatuhkan putusan atas dasar fakta di persidangan, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan fakta persidangan yang ada, bisa lebih berat maupun ringan.

Fakta persidangan dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggunakan lima macam alat bukti, yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Sehingga dalam hal terjadi pelecehan seksual bukti-bukti tersebut diatas dapat digunakan sebagai alat bukti. Sedangkan untuk pencabulan atau perkosaan dapat menggunakan salah satu alat bukti berupa Visum Et Repertum. Menurut kamus hukum oleh JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *visum et repertum* adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaanya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

Dalam hal tidak sampai terjadi persetubuhan maka perbuatan dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285 jo. Pasal 53 KUHP) dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP).

Tindak pidana perkosaan dalam konsep RUU KUHP diatur dalam Pasal 389 yang menyatakan bahwa:⁵⁴

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan:
 - ke-1 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - ke-2 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 - ke-3 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - ke-4 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya;
 - ke-5 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia dibawah 14 tahun, dengan persetujuannya;
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun, apabila dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 diatas: ke-1 seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan; ke-2 barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

Konsep itu merupakan langkah maju dibandingkan keberadaan rumusan dalam pasal-pasal KUHP yang lama yang cenderung tidak bisa mengakomodasi perkembangan kehidupan bermasyarakat dan kebangsaan. Kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya kasar, keji, vulgar dan sangat menjatuhkan martabat

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 116.

kemanusiaan dipersamakan dengan kejahatan kesusilaan pada umumnya. Sedangkan jerat hukum bagi pengirim pesan tidak senonoh melalui handphone maupun alat komunikasi lainnya merujuk pada ketentuan Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan pengaturan Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, orang yang mengirimkan informasi elektronik berupa kata-kata tidak senonoh yang dinilai telah melanggar kesusilaan melalui alat komunikasi dapat dilaporkan ke kepolisian dengan memberikan bukti pesan tidak senonoh yang diterima sebagai bukti permulaan selain nantinya di dukung oleh laporan kepolisian.

Dalam masalah kekerasan seksual terhadap wanita (perkosaan) banyak yang menyayangkan tentang kurang memberikannya efek jera terhadap pelaku tindak pidana perkosaan tersebut padahal dampak bagi korbannya sangat besar bahkan akan terus melekat pada kehidupan korban itu sendiri, oleh karena itu kebijakan hukum pidana yang diambil dalam

rangka pembentukan KUHP nasional yang akan datang adalah dengan cara merombak konstruksi hukum dan ancaman pidana yang dijatuhkan.

Usaha pencegahan adalah usaha bersama dimana harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat dan strata sosial. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan masalah kejahatan dan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada perempuan yang pada dasarnya lemah dan rentan dengan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Maka dari itu, terjadinya kejahatan seksual terhadap perempuan di dalam Transportasi Online dapat dicegah dan ditangani dengan upaya:

1. Selalu Mencatat Kode Kendaraan.

Saat mengendarai kendaraan umum terutama transportasi online, maka akan terdapat detail kode booking, nama sopir, dan nomor polisi kendaraan. Screen capture detail tersebut atau share detail tersebut pada orang terdekat kita ketika kita mulai merasa tidak aman, sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita mempunyai data kendaraan yang kita tumpangi yang akan membantu pihak kepolisian dan pihak kantor transportasi online untuk menindaklanjuti tindak kejahatan tersebut.

2. Langsung Turun Jika Merasa dalam Bahaya.

Saat kita merasa semakin tidak nyaman dan merasa keamanan kita mulai terancam, lebih baik turun dari kendaraan tersebut. Jika ada tempat aman untuk turun, lebih baik turun jika kita merasa dalam

bahaya. Mencari tempat yang ramai sehingga pelaku akan segan untuk mengikuti dan melakukan tindak kejahatan.

3. Pastikan Kaca Spion Tidak Mengarah Pada Kita.

Saat menggunakan transportasi online, selalu cek kaca spionnya. Pastikan kaca spion tidak mengarah pada kita. Mintalah dengan baik-baik dan secara sopan kepada driver untuk menggeser kaca spion tersebut jika kaca spion mengarah pada kita.

4. Tau Arah Jalan.

Saat menggunakan transportasi online pastikan untuk tau secara pasti ke arah jalan mana untuk menempuh tujuan kita. Kita bisa memanfaatkan bantuan navigasi yang telah tertera pada aplikasi untuk melihat rute jalan. Jika driver keluar dari arah tujuan kita, maka tanyakan secara baik-baik dan dengan sopan, jika merasa mulai tidak aman, segera meminta bantuan.

Selain upaya pencegahan yang dilakukan dari diri sendiri, pihak kantor juga dapat melakukan penanggulangan serta upaya pencegahan agar tidak terjadi kejahatan seksual dalam transportasi online dengan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan Tes Psikologi Kepada Para Calon Driver
2. Memperketat Persyaratan Pendaftaran Kepada Para Calon Driver
3. Melaporkan Data Driver Kepada Kementrian Komunikasi dan Informasi
4. Menyediakan Tombol SOS atau Tombol Panik Pada Aplikasi
5. Memberikan Pengawasan dan Kenyamanan Sesuai Dengan Undang-Undang Lalu Lintas

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online ada 5 (lima) tingkatan, yaitu tingkatan pertama *Gender Harassment*, tingkatan kedua *Seduction Behavior*, tingkatan ketiga *Sexsual Bribery*, tingkatan keempat *Coercion atau Threat*, dan tingkatan terakhir adalah *Sexual Imposition*. Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang bersifat serius ada 2 (dua) tingkatan, yaitu *Serious Froms of Harassment* dan *Less Serious Froms of Harassment*. Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan di atas, terdapat 7 (tujuh) bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: (1) Tindak pidana pelecehan seksual yang menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu pada kasus sebagai berikut: a. Pelecehan seksual dengan mengirimi pesan tidak senonoh; dan b. Pelecehan seksuak\dengan ajakan serta imbalan
2) Tindak pidana pelecehan seksual yang tidak menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu terjadi pada kasus sebagai berikut: a) Pelecehan seksual dengan percobaan

perkosaan; b) Pelecehan seksual dengan melakukan tindakan dan perhatian seksual; c) Pelecehan seksual dengan melakukan perbuatan tidak senonoh; d) Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampasan; dan e) Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampokan.

2. Implementasi Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual termuat dalam peraturan perundang-undangan hukum indonesia. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap korban tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 17. Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban. Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga telah mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Beberapa bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut: (1) Restitusi; (2) Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial; (3) Perlindungan dari Keluarga; (4) Perlindungan dari Masyarakat.

Pelecehan seksual sendiri sebenarnya termasuk kejahatan yang cukup berat karena dapat diancam mulai dari hukuman penjara dua tahun delapan bulan atau denda sesuai dengan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga hukuman yang sangat berat dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara apabila pelecehan menjadi pemerkosaan sesuai dengan yang tertera pada Pasal 285 KUHP. Untuk tindak pidana perkosaan sesuai dengan Pasal 285 untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban dan unsur-unsur adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh harus terpenuhi. Dalam hal tidak sampai persetubuhan maka perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh sesuai dengan Pasal

285 jo. Pasal 53 KUHP dan tindak pidana untuk berbuat cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP. Upaya penanganan dan pencegahan terjadinya suatu tindak kejahatan seksual terhadap perempuan perlu adanya sinergi antara masyarakat dan negara. Peran masyarakat yakni memberikan rasa aman kepada perempuan serta memberikan perhatian serta kepedulian terhadap perempuan yang mengalami kejahatan seksual.

Upaya pencegahan terjadinya suatu tindak kejahatan seksual dapat dimulai dari kantor itu sendiri, dengan memperketat penerimaan seorang driver serta penambahan tombol SOS pada aplikasi itu sendiri. Sedangkan upaya perlindungan dari diri sendiri agar terhindar dari tindak kejahatan seksual dalam transportasi online adalah dengan lebih berhati-hati dan waspada saat menggunakan transportasi online tersebut, mencocokkan data driver yang tertera pada aplikasi dengan driver yang menjemput ke lokasi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Pemerintah lebih memperhatikan masalah sarana dan prasarana yang menyangkut transportasi online dengan menyusun peraturan yang mengatur tentang transportasi online serta pengusaha transportasi online lebih memperhatikan dan menjaga keselamatan dan kenyamanan konsumen transportasi online sehingga

mengurangi angka kejahatan yang sedang marak terjadi ini, lebih tegas dalam mendindak para oknum yang terlibat dalam tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Malang, Reflika Aditama.
- Achie Sudiarti Luhullma, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, PT Alumni.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Anshari, Tampil. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- , Barda Nawawi. 2007. *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, CV. Akademika Persindo.
- Arif Gosita, 1987, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta, IND.HILL-CO.
- Asril Sitompul, 2001, *Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspac*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Adami Chazawi,. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Colier Rohan, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta, PT Tiara Yogya.
- E.Y. Kanter dan Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Bandung, Alumni.
- Mohammad Ekaputra,. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*.Medan: USU Press.
- Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press,
- Johnny Ibrahim, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Jakarta: Banyumedia,
- Julia Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif, Teoritus, dan Praktik*, Bandung, Alumni.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Maskun dan Wiwik Meilararti.2017.Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet. Bandung: Keni Media.
- Maskun.2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nanik Widayanti dan Yulius Waskita, 1987,*Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara
- P.A.F. Lamintang, 1996,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh. Prasetyo, 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Romli Atmasasmita,1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju.

- Tongat. 2003. Hukum Pidana Materiil. Malang: UMM Press.
- Topo Santoso, 1997, Seksualitas dan Hukum Pidana, Jakarta IND.HILL-CO.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2010.Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Bandung: Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung, PT. Refika Aditama
- Yahya Harahap, 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan). Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.
- Widodo.2011. Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus. Ygyakarta: Aswaja Pressindo.
- 2013. Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- 2013. Memerangi Cybercrime (Karakteristik, motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi). Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wisnubroto, Al. 2014. Praktik Persidangan Pidana.Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inormasi dan Transaksi Elektronik.

C. JURNAL

- Johan Runtu, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado dalam Lex Crime Vol. 1/No.2/April-Jun/2020
- Akbar Sayudi, Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Fiat Justisia, Faculty of Law, Lampung University, Bandarlampung, Vol 10 Issue 2, January-March 2016: pp.1-220
- Muhammad Hanafi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. 2019. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,
- Ninda Khoirunnisa. Skripsi. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017
- Iqbal Ramdhani, 2017. Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, SALAM, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 4 No.1, pp. 95-120
- Ari Dermawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Kemudahan Teknologi Digital”, Jurnal Manajemen Informatika dan Teknik Komputer, Vol. I, No. 2, (2015).
- Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan” Jurnal Lex et Societatis, Vol. I, No. 2, (2013).
- Ineu Rahmawati, “Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (CYBER CRIME) Dalam Peningkatan Cyber Defense”, Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol. 7, (2017).
- Supanto, “Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender”, Jurnal Antisipasi Hukum Pidana, Vol. 20, No. 3, (2004).
- Aries Dirgayunita, “Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan”, Jurnal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi, Vol. 1, No. 2, (2016).
- Hyu Sisca dan Clara Moningka, “Resiliensi Perempuan Dewasa Muda Yang Pernah Mengalami Kekerasan Seksual di Masa Kanak-Kanak, Jurnal Psikologi, Vol. 2, No. 1, (2008).

- Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fudisia”, Jurnal Perlindungan Konsumen dan Perjanjian, Vol.3. (2015)
- Hera Wahyuni, “Faktor Resiko Gangguan Stres Pasca Trauma pada Anak Korban Pelecehan Seksual”, Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 10, No.1, (2016).
- Siti Awaliyah, “Aspek Hukum Dalam Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th 27, No. 1 (2014).
- Edi Setiadi, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan”, Mimbar, Th XVII, No. 3 (2001).
- Syarifah Fauzi'ah, Faktor Penyebab Pelecehan Terhadap Anak, An-Nisa', Vol.IX, No. 2 (2016)
- Bintang Ayu Soraya, Dika Arum Permatasari, Nurlaila Yukamujrisa, “Peran Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Kejahatan Dunia Maya”, Jurnal Perubahan Sosial dan Kejahatan, Vol I, (2008).
- Sri Kurnianingsih, “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja”, Jurnal Buletin Psikologi, Tahun XI, No.2, (2003)

D. INTERNET

- <https://news.detik.com/berita/3632420/order-diantar-ke-tempat-magang-siswi-dicabuli-driver-ojek-online> diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pada pukul 13.31 WIB.
- <https://kumparan.com/@millennial/cerita-penumpang-dapat-chat-mesum-dari-driver-grabbike> diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pada pukul 13.41 WIB.
- <https://www.go-jek.com/terms-and-condition/>
- <https://www.grab.com/id/insurance>
- <http://www.gentanusa.com/2017/05/bocah-12-tahun-ketakutan-dilecehkan.html>
- <https://regional.kompas.com/read/2017/07/15/08291521/sopir-taksi-online-tertangkap-basah-hendak-perkosa-penumpangnya>
- <https://regional.kompas.com/read/2017/09/08/20313841/penumpang-perempuan-mengaku-dilecehkan-sopir-taksi-online-di-medan>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/driver-taksi-online-dilaporkan-onani-di-depan-penumpang-wanita-hamil.html>

<https://news.detik.com/berita/d-3866107/polisi-driver-taksi-online-lecehkan-penumpang-karena-cantik>

<https://kumparan.com/@millennial/cerita-penumpang-dapat-chat-mesum-daridriver-grabbike>

<https://m.liputan6.com/news/read/3491434/kronologis-sopir-taksi-online-coba-perkosa-penumpang-di-tambora>